



---

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2016 DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGELOLAAN  
POTENSI EKONOMI DI DESA SUKAMAJU**

**Sahrul Al Azhar Nainggolan<sup>1</sup>, Dedi Amrizal<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

Email: [Sahrulalazhar12@gmail.com](mailto:Sahrulalazhar12@gmail.com)

**Abstract**

*Optimizing the management of village economic potential requires a unit to open up opportunities for economic development and village income. Economic improvement is very important and efforts are made to improve welfare in Sukamaju Village, Pahae Jae District, North Tapanuli Regency. The purpose of the study was to determine the Management of Economic Potential in Sukamaju Village in the establishment of BUM Desa in Sukamaju Village. The research method used is descriptive method with qualitative data management, namely the method used to dissect a phenomenon and event and describe it in the form of sentences and language based on the findings in the field. Based on the results of research conducted, it is known that the North Tapanuli Regency Regulation number 4 of 2016 has been implemented, although it has not been fully optimal and implemented perfectly, it is known that based on the categorization of research such as efforts to achieve the policy objectives of establishing BUM Desa has not been optimal because previously there was no programs and activities in paying attention to the economic potential in Sukamaju Village. Efforts to socialize the management of economic potential have been carried out and carried out by the BUMDes Maju Bersama management. The administrative process of managing economic potential by BUMDes has been carried out for now, although it is still in an effort to improve service procedures even better. The obstacles so far in optimizing the economic potential in Sukamaju Village are due to the lack of attention and programs from the Sukamaju BUMdes towards natural resources that have economic potential.*

**Keywords: Implementation, Optimization, Potential and Economy**

**Abstrak**

Optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi desa diperlukan suatu unit untuk menjadi terbukanya peluang pembangunan perekonomian dan pendapatan desa. Peningkatan ekonomi menjadi sangat penting dan diupayakan dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Sukamaju Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Tujuan penelitian untuk mengetahui Pengelolaan Potensi Ekonomi di Desa Sukamaju dalam pendirian BUM Desa di Desa Sukamaju. Metode penelitian yang digunakan yaitu

## ***Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara....***

Nainggolan S.A, Amrizal D (2022)

metode deskriptif dengan pengelolaan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomena dan peristiwa dan menjabarkan dalam bentuk kalimat dan bahasa berdasarkan hasil temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa diketahui peraturan kabupaten tapanuli utara nomor 4 tahun 2016 ini telah terlaksana, walaupun belum sepenuhnya optimal dan terlaksanakan secara sempurna, hal ini diketahui berdasarkan pada kategorisasi penelitian seperti adanya upaya mencapai tujuan kebijakan pendirian BUM Desa belum optimal dikarenakan sebelumnya tidak adanya program dan kegiatan dalam memperhatikan potensi ekonomi di Desa Sukamaju. Upaya melakukan sosialisasi pengelolaan potensi ekonomi sudah terlaksana dan dilakukan oleh pengurus BUMDes Maju Bersama. Proses Administrasi pengelolaan potensi ekonomi oleh BUMDes telah dilaksanakan untuk saat ini walaupun masih dalam upaya perbaikan prosedur pelayanan yang lebih baik lagi. Adapun hambatan selama ini dalam mengoptimalkan potensi ekonomi di Desa Sukamaju yaitu disebabkan kurangnya perhatian dan program dari BUMdes Sukamaju terhadap sumber daya alam yang memiliki potensi ekonomi.

***Kata Kunci: Implementasi, Optimalisasi, Potensi dan Ekonomi***

### **A. PENDAHULUAN**

Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu lembaga yang terdapat pada desa dan dikelola oleh desa yang menjadi landasan adanya proses interaksi pada pengelolaan peningkatan perekonomian dan pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa. Dengan melakukan pengoptimalan pengelolaan potensi ekonomi desa diperlukan suatu unit tersebut untuk dapat menjadi terbukanya peluang pembangunan perekonomian dan pendapatan desa dan telah diperkuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 tahun 2016 tentang tata cara pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa yang menyatakan bahwa desa dapat memiliki atau mendirikan lembaga usaha yang mendukung peningkatan perekonomian desa. Pada proses pendirian BUM Desa telah diatur pada pasal 3 yang menyatakan bahwa pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yaitu ; a). inisiatif pemerintah desa dan masyarakat desa. b). potensi usaha ekonomi Desa. c). sumber daya alam Desa. d). sumber manusia yang mampu mengelola BUMDes, dan e). penyertaan modal dari pemerintah desa dalam membentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Serta modal awal pendirian BUM desa merupakan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan bukan milik kelompok maupun perorangan.

Berdasarkan kebijakan yang telah disebutkan adapun yang melatarbelakangi pendirian BUM Desa pada Desa Sukamaju yang merupakan salah satu desa yang berada pada Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli utara dapat ditelusuri karena beberapa kondisi yaitu: 1). adanya upaya yang

dilakukan pemerintah desa bersama masyarakat desa untuk dapat membentuk suatu unit usaha desa yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam menyediakan segala sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di desa sukamaju, 2). adanya suatu pasar yang terjadi dari didirikannya BUMDes seperti terjadinya proses penyediaan dan pengadaan kebutuhan yang menjadi peluang perputaran perekonomian antara BUMDes Dengan masyarakat desa sehingga memberikan keuntungan antara BUMDes dengan masyarakat, di samping perolehan keuntungan BUMDes dapat menambah Pendapatan asli desa sedangkan masyarakat diuntungkan dengan ketersediaannya kebutuhan dengan harga yang relatif lebih terjangkau. 3). adanya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Sukamaju yang merupakan harapan terbesar saat ini dari pengelolaannya yang menjadi perhatian khusus yang harus dilirik sehingga memiliki nilai ekonomi dan menjadi peningkatan kesejahteraan antara sesama masyarakat di desa sukamaju. 4). ketersediaan kualitas manusia yang dimiliki menjadi salah satu alasan penting dalam mempertahankan kelangsungan unit usaha yang dimiliki desa tersebut. 5). Kesiapan anggaran yang siap dialokasikan dalam memberikan suntikan dana guna mendukung ketersediaan barang yang harus dipasarkan dan diperdagangkan terhadap konsumen.

Dalam implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan unit BUMDes Maju Bersama di Desa Sukamaju yaitu dengan memperhatikan kondisi dan tujuan didirikannya BUMDes seperti pengelolaan potensi usaha ekonomi Desa dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada belum adanya hasil dan dampak yang dirasakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa Sukamaju, dalam memanfaatkan sumberdaya alam sektor pertanian yang menjadi potensi berkembangnya perekonomian desa melalui penyediaan kebutuhan pertanian seperti penyediaan pupuk, pestisida, cangkul, mesin dan alat-alat yang mendukung pertanian untuk mencapai maksud dan tujuan berdirinya BUMDes tersebut sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016. Dari penelaahan awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa dapat diketahui implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa belum tercapai dan tidak optimal hal ini dilihat berdasarkan dari maksud dan tujuan dari didirikannya BUM Desa bahwa belum adanya peningkatan perekonomian desa yang dihasilkan oleh BUMDes, tidak adanya tindakan dan program yang berjalan dalam upaya meningkatkan usaha masyarakat dalam

mengelola potensi ekonomi, tidak adanya peningkatan pendapat masyarakat dan pendapatan asli desa dari hasil pengelolaan BUMDes Maju Bersama.

## **B. METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana dalam penelitian ini didasarkan dari hasil observasi pengamatan langsung dilapangan. Menurut (Sugiyono, 2013) metode penelitian kualitatif diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu. pengumpulan data menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang diterapkan. Selanjutnya Teknik yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, menurut (Amrizal et al., 2018) yaitu dengan menyajikan data yang dimulai dengan meninjau semua data yang tersedia dari berbagai sumber yang dikumpulkan, mempelajari data, meninjaunya, menyusunnya dalam satuan-satuan kemudian mengkategorikannya pada langkah berikutnya, dan memeriksa validitasnya data dan menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalarnya peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian. Lokasi Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni di Kantor Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Jl. Lintas Tarutung-Sipirok. Adapun Penelitian Ini direncanakan pada Bulan Februari – Maret 2022.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. HASIL PENELITIAN**

#### **a. Adanya Upaya Mencapai Tujuan Kebijakan Pendirian BUM Desa**

Dalam mencapai tujuan kebijakan pendirian BUMDes Maju Bersama masih belum optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Hali ini ditunjukkan dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan selaku pelaksana kebijakan dan narasumber yang menjadi sasaran kebijakan. hal ini diketahui dikarenakan kurangnya perhatian dan program yang ditetapkan dalam mendukung peningkatan pengelolaan potensi ekonomi yang ada di desa Sukamaju. Namun dengan adanya peralihan kepengurusan yang dilakukan dalam upaya menyegarkan struktur organisasi BUMDes Maju Bersama, dengan menempatkan pengurus baru yang lebih memiliki kemampuan dan berpengalaman dalam memimpin, mengarahkan, mengelola dan menjalankan BUMDes Maju Bersama tersebut.

**b. Adanya Upaya Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi**

Pelaksanaan sosialisasi tentang optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi di desa sukamaju telah dilaksanakan dan dilakukan oleh BUMDes. Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada kegiatan sosialisasi tersebut yaitu adanya pelatihan dan penyuluhan terhadap masyarakat dalam memaksimalkan sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi yang berguna untuk meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat desa, dari hasil kegiatan tersebut masyarakat dapat mengembangkan potensi-potensi ekonomi seperti meningkatkan kualitas hasil pertanian. Adapun bentuk bantuan yang diberikan dari kegiatan tersebut yaitu masyarakat dapat mengajukan kebutuhan dan keinginan yang akan dilakukannya dengan melakukan kerjasama antara masyarakat dan BUMDes Maju Bersama yang dapat memberikan keuntungan terhadap BUMDes, desa dan Masyarakat Desa.

**c. Adanya Proses Administrasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Oleh BUMdes**

Proses administrasi maupun pelayanan yang dilakukan oleh BUMDes terhadap pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju belum optimal namun sehingga mempengaruhi proses pencapaian tujuan pendirian BUMDes di Desa Sukamaju, namun berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat mencapai tujuan dari pendirian BUMDes Maju bersama, dengan memperbaharui struktur kepengurusan sebelumnya dengan menetapkan kepengurusan yang lebih berpengalaman dan memiliki kapasitas. Dari upaya tersebut diharapkan adanya program dan agenda yang lebih baik lagi kedepannya yang nanti dapat memberikan kontribusinya selaku unit usaha yang dimiliki desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa di desa Sukamaju.

**d. Adanya Pembuatan Suatu Keputusan**

Pengambilan keputusan yang telah dilakukan pemerintah desa dan juga Pengurus BUMDes dalam menentukan arah dan tujuan pendirian BUM Desa dalam mengoptimalkan pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju belum optimal namun dikarenakan adanya pembaharuan kepengurusan yang baru diharapkan kedepannya dapat memberikan perubahan berdasarkan hasil keputusan yang telah dilakukan yaitu menyusun kebijakan dan agenda program yang akan dilaksanakan kedepannya dan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan, perekonomian dan pendapatan masyarakat serta pendapatan asli desa.

## **2. PEMBAHASAN**

### **a. Adanya Upaya Mencapai Tujuan Kebijakan Pendirian BUM Desa**

Menurut (Dwidjowijoto, 2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Berdasarkan asumsi teori tersebut dapat disimpulkan untuk dapat mencapai tujuan dari pendirian BUM Desa dalam pengelolaan potensi ekonomi tersebut dimana pada posisi ini Direktur BUMDes memiliki kewenangan untuk menetapkan program dan kebijakan yang akan direalisasikan dengan memberikan arahan terhadap seluruh pihak yang terkait untuk dapat menerapkan aturan-aturan yang telah disepakati bersama agar program dan agenda tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Dan juga dalam pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi terhadap target kebijakan yang akan dilaksanakan seperti masyarakat dan juga adanya pengembangan dari kebijakan yang telah disosialisasikan ataupun yang telah diperkenalkan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 4 tahun 2016 dalam upaya pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan BUMDes selaku unit usaha yang dimiliki desa dalam mencapai tujuan didirikannya BUMDes tersebut yaitu untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan minat masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi dan juga meningkatkan pendapat masyarakat dan pendapat asli desa pada kenyataannya belum optimal dan memberikan hasil yang maksimal sehingga mempengaruhi pencapaian harapan dari pembentuknya pendirian BUM Desa berdasarkan Perda Tapanuli Utara Nomor 4 tahun 2016. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa diketahui tujuan pendirian BUM Desa Maju Bersama belum optimal dikarenakan tindakan dan program yang dilakukan oleh pengurus BUMDes kurang memperhatikan potensi ekonomi yang ada sehingga minat masyarakat dalam meningkatkan usahanya tidak terdukung.

### **b. Adanya Upaya Melakukan Sosialisasi Pengelolaan Potensi Ekonomi.**

Menurut Dunn (Dunn, 2003) Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. (Dwidjowijoto, 2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu: a) langsung

mengimplementasikan dalam bentuk sosialisasi, b) melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan asumsi yang disimpulkan bahwa berdasarkan teori yang diatas bahwa dalam dalam pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju diperlukan serangkaian program dan agenda yang dilakukan oleh pemerintah desa, pengurus BUMDes dan juga masyarakat dalam melakukan sosialisasi. Pada posisi ini peran dari kepala desa selaku pemimpin desa sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan arahan dan nasehat terhadap kemajuan pengelolaan potensi ekonomi desa yang dilakukan oleh pengurus BUM. Dalam penetapan kebijakan yang telah disepakati seharusnya sudah dilaksanakan agar nantinya dari kegiatan sosialisasi tersebut dapat memberikan solusi terhadap masyarakat yang membutuhkan baik dari segi pengetahuan maupun bantuan modal usaha.

Dalam hal ini pelaksanaan sosialisasi tentang pengelolaan potensi ekonomi di Desa Sukamaju belum pernah dilaksanakan diakibatkan adanya perubahan kebijakan karena pergantian kepala desa, dimana diketahui bahwa dalam kepala desa dengan pengurus BUMDes sebelumnya kurang memperhatikan pengembangan potensi ekonomi yang seharusnya dapat membantu pendapatan asli desa dan juga dapat menggerakkan perekonomian masyarakat desa yang mengakibatkan terkendalanya pencapaian kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara nomor 4 tahun 2016. Namun untuk saat ini kepala desa bersama pengurus BUMDes yang baru sedang berusaha mengembangkan kembali fungsi BUMDes untuk dapat menjadi unit yang dapat mengoptimalkan pengelolaan pengembangan potensi ekonomi yang ada di desa Sukamaju saat ini.

### **c. Adanya Proses Administrasi Pengelolaan Potensi Ekonomi Oleh BUMdes.**

Berdasarkan teori ahli dari (Tachjan, 2006) yang menyatakan bahwa dalam Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Dan juga menurut (Hayat, 2018) Kebijakan adalah sebuah keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan-kepentingan publik yang diatur sedemikian rupa untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sebagai konsekuensi logis dalam tindakan dan pernyataan oleh pemerintah. Selanjutnya menurut (Ali & Saputra, 2020) Pemberian pelayanan dengan sebaik-baiknya adalah salah satu hasil kinerja yang dapat dilakukan pemerintahan desa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam standar pelayanan nasional yaitu kualitas pelayanan. Upaya yang dilakukan pemerintahan desa tersebut bertujuan untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. bahwa dalam upaya mencapai proses administrasi yang dilakukan pada

## ***Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara....***

Nainggolan S.A, Amrizal D (2022)

lingkungan pemerintah desa dan pengurus BUMDes Maju bersama bahwa diketahui dalam implementasi kebijakan publik telah melakukan kegiatan yang bersifat administrasi dimana dalam pengertian administrasi secara umum bahwa adanya suatu pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan, yaitu dengan melakukan kerjasama dan program dan agenda yang dapat bermanfaat bagi masyarakat dan penyelenggara bahwa untuk mencapai upaya pengoptimalisasian potensi ekonomi di desa Sukamaju diperlukan suatu ketetapan dan kebijakan yang tepat agar hasil yang didapatkan dapat memberikan hasil yang maksimal.

### **d. Adanya Pembuatan Suatu Keputusan.**

Menurut (Subarsono, 2005) berpendapat bahwa proses kebijakan publik terdiri atas lima tahapan yaitu sebagai berikut :a) penyusunan agenda, yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah, b) formulasi kebijakan, yakni proses penyusunan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah, c) pembuatan kebijakan, yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan, d) implementasi kebijakan, yakni proses untuk melaksanakan kebijakan agar mencapai hasil, e) evaluasi kebijakan, yakni proses memonitor dan memilih kerja atau hasil kebijakan. Dalam pembuatan keputusan diperlukan masukan dan pikiran dari pihak luar baik itu masyarakat desa maupun pemerintah desa, hal ini bertujuan untuk dapat mengetahui kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi Desa Sukamaju saat ini, dimana dalam optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi di Desa Sukamaju masih belum optimal.

Menurut (Mustopadidjaja A. R., 2003) Implementasi kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Berdasarkan teori ahli diatas penulis mengasumsikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk dapat mengetahui Pembuatan keputusan dalam upaya optimalisasi pengelolaan potensi ekonomi Di Desa Sukamaju dapat disimpulkan bahwa dalam proses pengambilan dengan melakukan serangkaian musyawarah bersama yang diikuti oleh kepala desa selaku penasehat dan juga BPD selaku pengawasan dalam kepengurusan BUMDes Maju bersama dan diikuti oleh masyarakat sebagai target pelaksanaan kegiatan pengoptimalisasian pengelolaan potensi ekonomi di desa Sukamaju.

## **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 4 Tahun 2016

telah terimplementasi, namun belum sepenuhnya optimal sesuai dengan maksud dan tujuan Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dampak yang terjadi dalam peningkatan perekonomian masyarakat desa dan pendapatan asli desa sejak didirikannya Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama

Adapun program yang dilakukan oleh BUMDes Maju Bersama Desa Sukamaju dalam pengelolaan potensi ekonomi hanya bergerak pada bidang perdagangan kebutuhan pertanian yang mudah didapat dari wirausaha luar. Sehingga banyak barang yang disediakan tersebut tidak laku. Namun dengan adanya perubahan struktur kepengurusan BUMDes Maju Bersama yang telah dilakukan diharapkan kedepannya dapat memberikan perubahan dalam menangani permasalahan yang terjadi sebelumnya, sehingga upaya-upaya dalam mencapai kebijakan yang telah ditetapkan dapat terimplementasikan dengan sebaik-baiknya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, K., & Saputra, A. 2020. Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.  
<https://doi.org/10.46576/wdw.v14i4.891>
- Amrizal, D., Yusriati, Y., & Lubis, H. 2018. The Role of General Election Commission (KPU) in Increasing Voters' Participation in Langkat, Medan, Indonesia. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 1(2), 13–24.  
<https://doi.org/10.33258/birci.v1i2.9>
- Dunn, W. N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik ( PDFDrive ).pdf*.
- Dwidjowijoto, dan W. 2001. *Analisis Kebijakan*. Elexmedia Komputindo.
- Hayat. 2018. Buku Kebijakan Publik. *Intrans Publishing, September*, 31.  
[https://www.researchgate.net/publication/335788910\\_Buku\\_Kebijakan\\_Publik](https://www.researchgate.net/publication/335788910_Buku_Kebijakan_Publik)
- Mustopadidjaja A. R., 1944-. 2003. *Manajemen proses kebijakan publik : formulasi, implementasi, dan evaluasi kinerja / Mustopadidjaja A.R.* Lembaga Administrasi Negara : Duta Pertiwi Foundation.
- Ramadana, Coristya Berlian, dkk. 2013. Keberadaan BUMDes sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Bau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Volume I Nomor 6.
- Subarsono, A. G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.

***Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara....***

Nainggolan S.A, Amrizal D (2022)

Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. AIPI.